

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Kabupaten Tanah Bumbu tidak termasuk dalam kabupaten/kota penghitung Indeks Harga Konsumen. Perkembangan dan pengendalian inflasi di dasarkan pada hasil monitoring perkembangan harga kebutuhan bahan pokok dan penting di Pasar Pemerintah yang dilakukan setiap hari. Terdapat 2 (dua) Pasar Pemerintah yang dijadikan obyek monitoring masing-masing :

1. Pasar Niaga Bersujud kecamatan Simpang Empat
2. Pasar Raya Bumi Pangeran Kecamatan Kusan Hilir

Angka Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Tanah Bumbu di Triwulan I tahun 2026 cenderung mengalami fluktuatif dibanding sama dengan IPH Triwulan IV tahun 2026. Angka IPH di bulan Januari berada pada posisi -0,10% kemudian agak meningkat di bulan Februari di angka 0, 28% dan kembali naik di bulan Maret hingga mencapai 2,47%.

Secara umum perkembangan harga kebutuhan pokok dan penting di Kabupaten Tanah Bumbu pada Triwulan I tahun 2026 mayoritas cenderung Stabil. Terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan cukup tinggi terutama cabe merah keriting, cabe rawit dan bawang merah.

Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan terus menerus selama triwulan I adalah sebagai berikut ;

42. **Bawang Merah** per 31 Maret 2026 harga bawang merah Rp 42.000/kg dimana harga 40.000 - Rp42.000 pada Bulan Januari, Rp43.000 - Rp48.000 di bulan Februari, dan Rp40.000 - Rp45.000 pada bulan Maret 2026,-.
43. **Cabe Merah Keriting** per 31 Maret 2026 harga cabe merah keriting berkisar antara 000 - Rp44.000 di bulan Januari, Rp46.000 - Rp55.000 di bulan Februari, dan Rp55.000 - Rp65.000 pada bulan Maret,-.
44. **Cabe Rawit Merah** per 31 Maret 2026 harga cabe rawit merah berkisar antara 000 - Rp58.000 di bulan Januari, Rp75.000 - Rp88.000 di bulan Februari, dan Rp90.000 - Rp100.000 pada bulan Maret,-.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Triwulan I Tahun 2026, kondisi inflasi di Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan kecenderungan meningkat, yang tercermin dari kenaikan Indeks Perubahan Harga (IPH), khususnya pada bulan Maret 2026. Kenaikan IPH ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Peningkatan permintaan musiman (seasonal demand) menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H terutama terhadap komoditas bahan pangan pokok seperti beras, cabai, bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng.
2. Gangguan distribusi dan pasokan, baik akibat faktor cuaca maupun peningkatan volume permintaan dalam waktu yang relatif singkat.
3. Fluktuasi harga komoditas pangan strategis, terutama komoditas yang sangat sensitif terhadap perubahan pasokan dan permintaan.
4. Keterbatasan kapasitas produksi lokal untuk beberapa komoditas pangan sehingga

masih bergantung pada pasokan dari daerah lain, yang menyebabkan harga mudah terpengaruh oleh kondisi regional dan nasional.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok penting selama Triwulan I Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah melaksanakan beberapa kebijakan dan kegiatan strategis, yaitu:

Gerakan Pangan Murah (GPM) adalah program intervensi pasar yang dilaksanakan oleh pemerintah, melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Pemerintah Daerah, sebagai respons cepat terhadap gejolak harga pangan di tingkat konsumen. Salah satu komoditas utama yang menjadi fokus dalam kegiatan ini adalah **beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)**. Di tengah tren kenaikan harga beras di pasaran, GPM hadir sebagai solusi taktis untuk memotong rantai distribusi yang panjang, sehingga masyarakat dapat membeli beras berkualitas dengan harga terjangkau, langsung dari sumbernya, yaitu Perum Bulog.

Kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan laju inflasi daerah, yang seringkali dipicu oleh volatilitas harga beras. Gerakan Pangan Murah untuk beras SPHP adalah instrumen hilir yang efektif dalam program stabilisasi pangan nasional. Kegiatan ini tidak hanya berhasil meredam gejolak harga secara temporer, tetapi juga memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pemerintah secara aktif bekerja untuk menjamin kebutuhan pokok mereka. Keberlanjutan GPM menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pangan dan ekonomi di tingkat akar rumput.

Foto Kegiatan

Rapat Koordinasi dan Rapat Teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

dilaksanakan sebagai forum koordinasi untuk menyusun langkah strategis menjaga stabilitas harga. Rapat membahas evaluasi inflasi terkini, komoditas penyumbang utama, serta faktor risiko pasokan dan distribusi. Peserta terdiri dari pemerintah daerah, Bank Indonesia, OPD terkait, dan pemangku kepentingan lainnya. Fokus pembahasan meliputi penguatan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif kepada masyarakat. Rapat juga merumuskan rencana aksi konkret, penugasan lintas sektor, serta mekanisme pemantauan berkala guna memastikan kebijakan pengendalian inflasi berjalan efektif, responsif, dan berkelanjutan di daerah. Hasilnya menjadi dasar pengambilan keputusan kebijakan ekonomi daerah yang tepat waktu dan terukur secara berkelanjutan.

Foto Kegiatan

Monitoring Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok Pangan Menjelang Idul Fitri 1447

H dilakukan dalam rangka memantau ketersediaan dan fluktuasi harga pangan pokok. Dari Hasil monitoring, ketersediaan pangan pasokan dan stock cukup tersedia dan harga cenderung naik seperti bawang, cabai rawit dan ayam namun ada beberapa yg masih berfluktuasi. Adanya beberapa komoditas yang naik akibat stok menipis akibat pasokan distribusi terhambat yang diakibatkan oleh bencana alam dan cuaca buruk. Menghimbau kepada masyarakat untuk berbelanja sesuai kebutuhan dan menghimbau kepada para distributor untuk tidak menahan distribusi barang kebutuhan pokok.

Foto Kegiatan

Dalam **upaya merespons tingginya harga cabai rawit** yang sempat terjadi di pasar, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melaksanakan **kegiatan pembagian bibit tanaman cabai kepada masyarakat** rumah tangga. Kebijakan ini terbukti sangat efektif menurunkan Indeks Perkembangan Harga Kabupaten Tanah Bumbu hingga mencapai angka 1,28% di minggu pertama bulan April karena dapat mengendalikan harga cabai di pasar.

Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok penting selama Triwulan I Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah melaksanakan beberapa kebijakan dan kegiatan strategis, yaitu:

Gerakan Pangan Murah (GPM) adalah program intervensi pasar yang dilaksanakan oleh pemerintah, melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Pemerintah Daerah, sebagai respons cepat terhadap gejolak harga pangan di tingkat konsumen. Salah satu komoditas utama yang menjadi fokus dalam kegiatan ini adalah **beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)**. Di tengah tren kenaikan harga beras di pasaran, GPM hadir sebagai solusi taktis untuk memotong rantai distribusi yang panjang, sehingga masyarakat dapat membeli beras berkualitas dengan harga terjangkau, langsung dari sumbernya, yaitu Perum Bulog.

Kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan laju inflasi daerah, yang seringkali dipicu oleh volatilitas harga beras. Gerakan Pangan Murah untuk beras SPHP adalah instrumen hilir yang efektif dalam program stabilisasi pangan nasional. Kegiatan ini tidak hanya berhasil meredam gejolak harga secara temporer, tetapi juga memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pemerintah secara aktif bekerja untuk menjamin kebutuhan pokok mereka. Keberlanjutan GPM menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pangan dan ekonomi di tingkat akar rumput.

Foto Kegiatan

Rapat Koordinasi dan Rapat Teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

dilaksanakan sebagai forum koordinasi untuk menyusun langkah strategis menjaga stabilitas harga. Rapat membahas evaluasi inflasi terkini, komoditas penyumbang utama, serta faktor risiko pasokan dan distribusi. Peserta terdiri dari pemerintah daerah, Bank Indonesia, OPD terkait, dan pemangku kepentingan lainnya. Fokus pembahasan meliputi penguatan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif kepada masyarakat. Rapat juga merumuskan rencana aksi konkret, penugasan lintas sektor, serta mekanisme pemantauan berkala guna memastikan kebijakan pengendalian inflasi berjalan efektif, responsif, dan berkelanjutan di daerah. Hasilnya menjadi dasar pengambilan keputusan kebijakan ekonomi daerah yang tepat waktu dan terukur secara berkelanjutan.

Foto Kegiatan

Monitoring Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok Pangan Menjelang Idul Fitri 1447

H dilakukan dalam rangka memantau ketersediaan dan fluktuasi harga pangan pokok. Dari Hasil monitoring, ketersediaan pangan pasokan dan stock cukup tersedia dan harga cenderung naik seperti bawang, cabai rawit dan ayam namun ada beberapa yg masih berfluktuasi. Adanya beberapa komoditas yang naik akibat stok menipis akibat pasokan distribusi terhambat yang diakibatkan oleh bencana alam dan cuaca buruk. Menghimbau kepada masyarakat untuk berbelanja sesuai kebutuhan dan menghimbau kepada para distributor untuk tidak menahan distribusi barang kebutuhan pokok.

Foto Kegiatan

Dalam **upaya merespons tingginya harga cabai rawit** yang sempat terjadi di pasar, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melaksanakan **kegiatan pembagian bibit tanaman cabai kepada masyarakat** rumah tangga. Kebijakan ini terbukti sangat efektif menurunkan Indeks Perkembangan Harga Kabupaten Tanah Bumbu hingga mencapai angka 1,28% di minggu pertama bulan April karena dapat mengendalikan harga cabai di pasar.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi selama Triwulan I Tahun 2026, dapat disimpulkan bahwa:

1. Koordinasi TPID berjalan dengan baik, terutama dalam menghadapi tekanan inflasi musiman menjelang HBKN.
2. Monitoring harga dan ketersediaan barang cukup efektif dalam memberikan gambaran kondisi pasar secara aktual sehingga pemerintah daerah dapat melakukan langkah antisipatif.
3. Operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah mampu membantu menahan laju kenaikan harga dan menjaga daya beli masyarakat, meskipun belum sepenuhnya menghilangkan

tekanan inflasi akibat faktor musiman.

Tantangan utama yang masih dihadapi adalah ketergantungan pasokan dari luar daerah, serta keterbatasan intervensi jangka panjang terhadap sisi produksi dan distribusi

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Untuk meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi di Kabupaten Tanah Bumbu ke depan, beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan produksi pangan lokal, khususnya komoditas penyumbang inflasi utama, melalui dukungan kepada petani, peternak, dan pelaku usaha pangan.
2. Peningkatan intensitas dan cakupan monitoring harga, termasuk pemanfaatan sistem informasi harga pangan secara real time.
3. Penguatan kerja sama antar daerah, terutama daerah penghasil pangan, guna menjamin kelancaran pasokan dan stabilitas harga.
4. Perencanaan intervensi pasar yang lebih dini, terutama menjelang HBKN, agar tekanan inflasi dapat ditekan sejak awal.
5. Penguatan peran TPID secara berkelanjutan, melalui peningkatan kapasitas SDM, koordinasi lintas sektor, serta evaluasi rutin terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan.